



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan layanan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 78);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal atau lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo.
9. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran

yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.

10. Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Jalur prestasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah reguler dan sekolah SPP-SKS yang pola seleksinya didasarkan penelusuran kemampuan akademik/ non akademik berjenjang dan non jenjang
12. Peserta Didik Teladan adalah Peserta Didik yang memiliki kecerdasan spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan terbaik di Satuan Pendidikan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN PPDB

### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh akses pendidikan dan layanan mutu yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TATA CARA PPDB

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) PPDB pada SD Negeri dan SMP Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) pada laman <https://ppdbsda.net> dan/atau luar jaringan (*Luring/offline*).
- (2) Bagi TK Negeri PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*Luring/offline*).
- (3) Sekolah TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun berjalan.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK Negeri adalah:

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) SD Negeri, adalah :

- a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, wajib diterima sebagai peserta didik;
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa/ bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Psikolog profesional.

### Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Negeri adalah :

- a. berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

### Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

### Pasal 9

- (1) Calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi maksimal 5% dari kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan.
- (2) Pembatasan Kuota Penerimaan Peserta Didik untuk masing-masing Satuan Pendidikan sebesar 5% tidak diperuntukkan bagi:

- a. calon peserta didik baru dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo, dengan Kartu Keluarga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- b. calon peserta didik baru dari sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kartu Keluarga dan berdomisili di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga  
Rombongan Belajar dan Pagu

Pasal 10

- (1) Jenjang TK maksimal 2 rombongan belajar, pagu tiap rombongan belajar maksimal 20 peserta didik.
- (2) Jenjang SD maksimal 4 rombongan belajar, pagu tiap rombongan belajar maksimal 28 peserta didik.
- (3) Jenjang SMP maksimal 11 rombongan belajar, pagu tiap rombongan belajar maksimal 32 peserta didik.

Bagian Keempat  
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi;
  - b. Prestasi; dan
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Calon peserta didik baru dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam zonasi dan/ atau di luar zonasi.
- (8) Calon peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan ditentukan berdasarkan total skor tertinggi, dan apabila terdapat skor yang sama maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (9) Pembagian zona dalam pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
PPDB Jalur Zonasi

Pasal 12

PPDB Jalur Zonasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPDB Jalur Zonasi diprioritaskan bagi calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/ wali, terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. Jarak dapat diukur dengan menggunakan aplikasi *google maps*, *google fit*, *strava* atau aplikasi lain yang dapat ditempuh dengan kendaraan atau jalan kaki dari tempat tinggal ke sekolah tujuan, yang paling menguntungkan calon peserta didik;
- c. Jarak diberikan skor: 100 – 0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 (seratus) meter dikurangi 1 (satu) skor;
- d. Calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/ wali dan tinggal bersama orang tua/ wali, dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, diberikan tambahan skor, sebagai berikut:
  1. dalam satu RT (Rukun Tetangga) dengan sekolah tujuan ditambah skor: 20;
  2. dalam satu RW (Rukun Warga) dengan sekolah tujuan ditambah skor: 15;
  3. dalam satu desa/ kelurahan dengan sekolah tujuan ditambah skor: 10;
- e. Calon peserta didik yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui Kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- f. Calon peserta didik dapat diberikan surat keterangan domisili hanya yang benar-benar telah berdomisili/ bertempat tinggal bersama orang tua/ wali dan sekolah asal dekat domisili/ tempat tinggal, dan tidak diberikan tambahan skor;
- g. Surat keterangan domisili yang dibuat oleh Ketua RT wajib dilampiri dengan Pakta Integritas yang dibuat oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, bermaterai cukup.

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, dan diberikan tambahan skor: 20, dengan melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan/ atau keterangan benar-benar tidak mampu dari Ketua RT, disetujui Ketua RW dan diketahui Kepala Desa/ Kepala Kelurahan disertai pakta

integritas yang di buat oleh Ketua RT, disetujui Ketua RW dan diketahui oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, bermaterai cukup.

- (2) Calon peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) wajib diterima pada satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif dengan menunjukkan hasil *assessment* dari Psikolog profesional, sesuai pagu yang ditentukan.
- (3) Orang tua /wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peserta didik yang orang tua/ walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (5) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/ wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (6) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (7) Calon peserta didik dari lulusan SD/ MI Negeri/ Swasta yang sulit terjangkau diprioritaskan diterima di SMP Negeri yang terdekat sesuai pilihan dengan memperoleh skor: 100.
- (8) Calon peserta didik dari anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, dan diberikan tambahan skor: 20, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen) dari 90% (sembilan puluh persen) kuota zonasi pada setiap satuan pendidikan.
- (9) Calon peserta didik teladan dari SD/ MI/ Negeri/ Swasta kelas 6 (enam), yang dipilih berdasarkan penilaian guru dan kepala sekolah atas keteladanan sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, diprioritaskan untuk dapat diterima di SMP Negeri mendapatkan skor: 100, dengan melampirkan surat keterangan peserta didik teladan dari kepala SD/ MI Negeri/ Swasta, diketahui oleh pengawas SD/ MI binaan, maksimal 1 (satu) peserta didik setiap rombongan, dan maksimal 4 (empat) peserta didik setiap satuan pendidikan SD/ MI Negeri/ Swasta.
- (10) Satuan pendidikan SD/ MI Negeri/ Swasta yang lokasi sekolahnya lebih dari 1 (satu) kilometer dari SMP Negeri terdekat diberikan Kuota pemerataan akses layanan pendidikan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik kelas enam SD/MI, dipilih oleh kepala sekolah bersama dewan guru dari peserta didik teladan dengan mengutamakan keluarga tidak mampu, diberikan skor: 100, selain peserta didik teladan di maksud pada ayat (9)
- (11) SMP Negeri Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diberikan kuota dari peserta didik teladan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari 90% (sembilan puluh persen) kuota zonasi.
- (12) Khusus untuk SMP Negeri 1 Sedati yang ada MoU antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Lanudal Juanda,



diberikan kuota maksimal 20% (dua puluh persen) dari 90% (sembilan puluh persen) kuota zonasi dari calon peserta didik di lingkungan/ keluarga TNI-AL Lanudal Juanda.

Paragraf 3  
PPDB Jalur Prestasi

Pasal 14

PPDB Jalur Prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat akademik/ non akademik berjenjang secara perorangan/ beregu yang diperoleh peserta didik baru pada saat kelas IV, V atau VI SD/ MI atau sederajat dengan Juara I akademik tingkat kabupaten perorangan/ beregu, Juara I dan II akademik/ non akademik tingkat provinsi perorangan/ beregu, dan Juara I, II, III akademik/ non akademik tingkat nasional/ internasional perorangan/ beregu;
- b. Calon peserta didik dari luar Kabupaten Sidoarjo memiliki sertifikat akademik/ non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik baru pada kelas IV, V atau VI SD/ MI atau sederajat dengan Juara I provinsi, dan Juara I, II, III tingkat nasional/ internasional;
- c. memiliki sertifikat Juara I lomba/ pertandingan (*event*) akademik/ non akademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru pada kelas IV, V atau VI SD tingkat kabupaten, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- d. Calon peserta didik yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS harus memiliki sertifikat akademik berjenjang yang diperoleh calon peserta didik baru pada kelas IV, V atau VI SD/ MI atau sederajat dengan Juara I akademik tingkat kabupaten perorangan, Juara I dan II akademik/ non akademik tingkat provinsi perorangan, dan Juara I, II, III akademik/ non akademik tingkat nasional/ internasional perorangan;
- e. Calon peserta didik yang mendaftar pada SMP Negeri Penyelenggara SKS harus memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh Peserta Didik Baru pada kelas IV, V atau VI SD/MI atau sederajat dengan Juara I akademik tingkat nasional/ internasional perorangan;
- f. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, harus memiliki sertifikat akademik berjenjang yang diperoleh pada kelas IV, V atau kelas VI SD/ MI atau sederajat dengan Juara I akademik tingkat provinsi perorangan, dan Juara I, II, III akademik tingkat nasional/ internasional perorangan.

Paragraf 4  
PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/ wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, pendaftaran dilakukan dengan luar jaringan/offline.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 16

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Bagian Kelima  
Seleksi PPDB

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan kuota jalur zonasi 95% (sembilan puluh lima persen) dan jalur perpindahan orang tua 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dikamsud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Bagian Keenam  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

## Bagian Ketujuh Biaya

### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/ Kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal, dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ atau sistem zonasi.

### Pasal 21

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat dipindah ke SD di Sidoarjo setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Sidoarjo setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

### Pasal 22

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/ informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/ informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/ informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun ajaran kepada Dinas.
- (2) Laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB melalui laman: <https://ppdbnda.net>.
- (3) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/ atau
    4. pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan;
  - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru dan/ atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/ atau
    4. pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan;
  - c. Kepala Sekolah memberikan sanksi kepada calon peserta didik atau orang tua/ wali yang terbukti memberikan data, dokumen, keterangan yang tidak benar, palsu/ dipalsukan maka peserta didik dikenakan sanksi berupa pembatalan/ tidak diterima sebagai peserta didik di sekolah tujuan;
  - d. Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, dan/ atau pihak lain yang terbukti memberikan data, dokumen, keterangan yang tidak benar, palsu/ dipalsukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 26

**Zona PPDB Jenjang SD Negeri**

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
1	SDN PUCANG 1 SIDOARJO	
	SDN PUCANG 2 SIDOARJO	
	SDN PUCANG 3 SIDOARJO	
	SDN PUCANG 4 SIDOARJO	
	SDN PUCANG 5 SIDOARJO	
	SDN MAGERSARI SIDOARJO	
2	SDN BANJAR BENDO SIDOARJO	
	SDN JATI SIDOARJO	
	SDN SIDOKARE 1 SIDOARJO	
	SDN SIDOKARE 2 SIDOARJO	
	SDN SIDOKARE 3 SIDOARJO	
	SDN SIDOKARE 4 SIDOARJO	
	SDN CEMENGKALANG SIDOARJO	
	SDN LEMAHPUTRO 1 SIDOARJO	
	SDN LEMAHPUTRO 3 SIDOARJO	
	3	SDN PUCANG ANOM SIDOARJO
SDN BULUSIDOKARE SIDOARJO		
4	SDN SUKO 1 SIDOARJO	
	SDN SUKO 2 SIDOARJO	
	SDN SUMPUT SIDOARJO	
	SDN LEBO SIDOARJO	
	SDN CEMENGBAKALAN 1 SIDOARJO	
	SDN CEMENGBAKALAN 2 SIDOARJO	
5	SDN SIDOKLUMPUK SIDOARJO	
	SDN SIDOKUMPUL SIDOARJO	
	SDN BLURU KIDUL 1 SIDOARJO	
	SDN BLURU KIDUL 2 SIDOARJO	
6	SDN SEKARDANGAN SIDOARJO	
	SDN RANGKAH KIDUL SIDOARJO	
	SDN GEBANG 1 SIDOARJO	
7	SDN ENTALSEWU BUDURAN	
	SDN PAGERWOJO BUDURAN	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
8	SDN SIDOKEPUNG 1 BUDURAN	
	SDN SIDOKEPUNG 2 BUDURAN	
9	SDN SUKOREJO BUDURAN	
	SDN BUDURAN	
	SDN SIDOKERTO BUDURAN	
10	SDN BANJARKEMANTREN 1 BUDURAN	
	SDN BANJARKEMANTREN 2 BUDURAN	
11	SDN WADUNGASIH 1 BUDURAN	
	SDN WADUNGASIH 2 BUDURAN	
12	SDN BANJARSARI BUDURAN	
	SDN PRASUNG BUDURAN	
13	SDN DAMARSIH BUDURAN	
	SDN DUKUH TENGAH BUDURAN	
	SDN SAWOHAN 1 BUDURAN	
14	SDN SIDOMULYO BUDURAN	
	SDN SIWALANPANJI BUDURAN	
	SDN KEMIRI	Dari Kec. Sidoarjo
15	SDN SAWOHAN 2 BUDURAN	
16	SDN CANDI	
	SDN KEBONSARI CANDI	
	SDN BLIGO CANDI	
	SDN WEDORO KLURAK CANDI	
	SDN TENGGULUNAN CANDI	
	SDN KLURAK CANDI	
17	SDN LARANGAN CANDI	
	SDN CELEP	Dari Kec. Sidoarjo
18	SDN KALIPECABEAN CANDI	
	SDN KENDALPECABEAN CANDI	
	SDN KEDUNGPELUK 1 CANDI	
	SDN KEDUNGPELUK 2 CANDI	
	SDN GEBANG 2	Dari Kec. Sidoarjo

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
19	SDN BALONGGABUS CANDI	
	SDN NGAMPELSARI CANDI	
	SDN BALONGDOWO CANDI	
	SDN GELAM 1 CANDI	
	SDN GELAM 2 CANDI	
20	SDN SUGIHWARAS CANDI	
	SDN SUMORAME CANDI	
	SDN KEDUNGKENDO CANDI	
	SDN KARANGTANJUNG CANDI	
21	SDN SUMOKALI CANDI	
	SDN SEPANDE CANDI	
	SDN SIDODADI CANDI	
	SDN JAMBANGAN CANDI	
	SDN DURUNGBANJAR CANDI	
	SDN DURUNGBEDUG CANDI	
22	SDN PLUMBON I PORONG	
	SDN PLUMBON II PORONG	
	SDN GLAGAHARUM PORONG	
23	SDN MINDI PORONG	
	SDN GEDANG I PORONG	
	SDN GEDANG II PORONG	
	SDN PAMOTAN PORONG	
24	SDN WUNUT I PORONG	
	SDN WUNUT II PORONG	
	SDN CANDI PARI I PORONG	
	SDN CANDI PARI II PORONG	
	SDN PESAWAHAN PORONG	
25	SDN LAJUK PORONG	
	SDN KEDUNG BOTO PORONG	
26	SDN KESAMBI PORONG	
	SDN KEBAKALAN PORONG	



ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
27	SDN KEBUNAGUNG I PORONG	
	SDN KEBUNAGUNG II PORONG	
	SDN KEBUNAGUNG IV PORONG	
	SDN KEDUNGSOLO PORONG	
28	SDN JUWETKENONGO PORONG	
	SDN PORONG	
29	SDN MOJORUNTUT 1 KREMBUNG	
	SDN MOJORUNTUT 3 KREMBUNG	
	SDN REJENI KREMBUNG	
	SDN GADING KREMBUNG	
	SDN TANJEKWAGIR KREMBUNG	
	SDN KEDUNGRWAN 1 KREMBUNG	
	SDN KEDUNGRWAN 2 KREMBUNG	
	SDN KANDANGAN KREMBUNG	
	SDN BALONGGARUT KREMBUNG	
	SDN JENGGOT KREMBUNG	
	SDN PLOSO KREMBUNG	
30	SDN KREMBUNG 1	
	SDN KREMBUNG 2	
	SDN LEMUJUT KREMBUNG	
	SDN WONOMLATI KREMBUNG	
	SDN CANGKRING 1 KREMBUNG	
	SDN CANGKRING 2 KREMBUNG	
	SDN MOJORUNTUT 2 KREMBUNG	
31	SDN WAUNG KREMBUNG	
	SDN WANGKAL KREMBUNG	
	SDN KEPER KREMBUNG	
	SDN TAMBAKREJO 1 KREMBUNG	
	SDN TAMBAKREJO 2 KREMBUNG	
	SDN KEDUNGSUMUR 1 KREMBUNG	
	SDN KEDUNGSUMUR 3 KREMBUNG	
32	SDN KENONGO I TULANGAN	
	SDN KENONGO II TULANGAN	
	SDN KEPATIHAN I TULANGAN	
	SDN KEPATIHAN II TULANGAN	
	SDN TULANGAN I	
	SDN TULANGAN II	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
33	SDN GELANG I TULANGAN	
	SDN GELLANG II TULANGAN	
	SDN JIKEN TULANGAN	
34	SDN KEDONDONG I TULANGAN	
	SDN KEDONDONG II TULANGAN	
	SDN SUDIMORO TULANGAN	
	SDN MEDALEM TULANGAN	
35	SDN PANGKEMIRI I TULANGAN	
	SDN PANGKEMIRI II TULANGAN	
	SDN GANGGANGPANJANG	Dari Kec. Tanggulangin
36	SDN KEMANTREN I TULANGAN	
	SDN KEMANTREN II TULANGAN	
	SDN MODONG TULANGAN	
	SDN GRINTING TULANGAN	
37	SDN SINGOPADU TULANGAN	
	SDN KAJEKSAN TULANGAN	
	SDN KEPUNTEN TULANGAN	
38	SDN GROGOL TULANGAN	
	SDN KEPUHKEMIRI TULANGAN	
39	SDN KEPADANGAN I TULANGAN	
	SDN KEPADANGAN II TULANGAN	
	SDN TLASIH TULANGAN	
	SDN JANTI I TULANGAN	
	SDN JANTI II TULANGAN	
	SDN KEBARON TULANGAN	
	SDN KERET	Dari Kec. Krembung
40	SDN RANDEGAN TANGGULANGIN	
	SDN KETEGAN TANGGULANGIN	
	SDN KEDENSARI 1 TANGGULANGIN	
	SDN KEDENSARI 2 TANGGULANGIN	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
41	SDN KALISAMPURNO 1 TANGGULANGIN	
	SDN KALISAMPURNO 2 TANGGULANGIN	
42	SDN KLUDAN TANGGULANGIN	
	SDN KALISAMPURNO 3/KETAPANG TANGGULANGIN	
	SDN BORO TANGGULANGIN	
43	SDN KALITENGAH 1 TANGGULANGIN	
	SDN KALITENGAH 2 TANGGULANGIN	
	SDN NGABAN TANGGULANGIN	
	SDN GEMPOLSARI TANGGULANGIN	
44	SDN KALIDAWIR TANGGULANGIN	
	SDN PUTAT TANGGULANGIN	
	SDN BANJARASRI TANGGULANGIN	
	SDN KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN	
	SDN BANJARPANJI TANGGULANGIN	
45	SDN PENATARSEWU TANGGULANGIN	
	SDN SENTUL TANGGULANGIN	
46	SDN KEBOGUYANG JABON	
	SDN PERMISAN JABON	
	SDN TAMBAK KALISOGO 1 JABON	
	SDN KUPANG 3 JABON	
	SDN KUPANG 4 JABON	
47	SDN KEDUNGCANGKRING JABON	
	SDN DUKUHSARI 1 JABON	
	SDN DUKUHSARI 2 JABON	
	SDN PANGGREH 1 JABON	
	SDN PANGGREH 2 JABON	
	SDN TROMPOASRI 3 JABON	
48	SDN JEMIRAHAN JABON	
	SDN BALONGTANI JABON	
	SDN KEDUNGREJO 1 JABON	
	SDN KEDUNGREJO 2 JABON	
	SDN TROMPOASRI 1 JABON	
	SDN TROMPOASRI 2 JABON	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
49	SDN KUPANG JABON	
	SDN TAMBAK KALISOGO 2 JABON	
	SDN SEMAMBUNG JABON	
	SDN KEDUNGPANDAN 1 JABON	
	SDN KEDUNGPANDAN 2 JABON	
50	SDN KRIAN I	
	SDN KRIAN II	
	SDN KRIAN III	
	SDN KRIAN IV	
51	SDN TROPODO KRIAN	
	SDN KATERUNGAN KRIAN	
	SDN SEDENGAN MIJEN KRIAN	
	SDN JERUKGAMPING KRIAN	
52	SDN GAMPING I KRIAN	
	SDN GAMPING II KRIAN	
	SDN TERIK KRIAN	
	SDN JUNWANGI KRIAN	
53	SDN TERUNGWETAN I KRIAN	
	SDN TERUNGWETAN II KRIAN	
	SDN KEBOHARAN KRIAN	
	SDN JATIKALANG I KRIAN	
	SDN JATIKALANG II KRIAN	
54	SDN KEMASAN KRIAN	
	SDN PONOKAWAN KRIAN	
	SDN TAMBAK KEMERAAN KRIAN	
	SDN SIDOMEDJO KRIAN	
55	SDN KRATON KRIAN	
	SDN SIDOMULYO I KRIAN	
	SDN SIDOMULYO II KRIAN	
	SDN TEMPEL KRIAN	
56	SDN SIDOREJO KRIAN	
	SDN BARENGKRAJAN I KRIAN	
	SDN BERENGKRAJAN II KRIAN	
	SDN WATUGOLONG I KRIAN	
	SDN WATUGOLONG II KRIAN	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
57	SDN KEMANGSEN 1 BALONGBENDO	
	SDN KEMANGSEN 2 BALONGBENDO	
	SDN JABARAN BALONGBENDO	
58	SDN WATES SARI2 BALONGBENDO	
	SDN SEKETI BALONGBENDO	
59	SDN SUWALUH 1 BALONGBENDO	
	SDN SUWALUH 2 BALONGBENDO	
	SDN GAGANG KEPUHSARI BALONGBENDO	
	SDN WARUBERON BALONGBENDO	
60	SDN WONOKUPANG BALONGBENDO	
	SDN SEDURI 1 BALONGBENDO	
	SDN SEDURI 2 BALONGBENDO	
61	SDN SUMOKEMBANGSRI 1 BALONGBENDO	
	SDN SUMOKEMBANGSRI 2 BALONGBENDO	
	SDN BAKUNG TEMENGGUNGAN BALONGBENDO	
62	SDN JERUK LEGI 1 BALONGBENDO	
	SDN JERUK LEGI 2 BALONGBENDO	
63	SDN WRINGINPITU BALONGBENDO	
	SDN PENAMBANGAN BALONGBENDO	
	SDN BALONGBENDO	
64	SDN BAKUNG PRINGGODANI BALONGBENDO	
	SDN WONOKARANG BALONGBENDO	
	SDN BOGEMPINGGIR BALONGBENDO	
65	SDN KEDUNGSUKODANI BALONGBENDO	
	SDN SINGKALAN BALONGBENDO	
66	SDN KALIMATI 1 TARIK	
	SDN KALIMATI 2 TARIK	
	SDN KLANTINGSARI 1 TARIK	
	SDN KLANTINGSARI 2 TARIK	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
67	SDN KEDINDING TARIK	
	SDN GEMPOLKLUTUK TARIK	
	SDN BANJARWUNGU 1 TARIK	
	SDN BANJARWUNGU 2 TARIK	
68	SDN KENDALSEWU TARIK	
	SDN MERGOSARI 1 TARIK	
	SDN MERGOSARI 2 TARIK	
	SDN MERGOBENER TARIK	
69	SDN SEGODOBANCANG TARIK	
	SDN JANTI 1 TARIK	
	SDN JANTI 2 TARIK	
70	SDN KEMUNING TARIK	
	SDN BALONGMACEKAN TARIK	
	SDN TARIK 1	
	SDN TARIK 2	
71	SDN SINGOGALIH TARIK	
	SDN MINDUGADING TARIK	
	SDN KEDUNGBOCOK TARIK	
	SDN GAMPINGROWO 1 TARIK	
	SDN GAMPINGROWO 2 TARIK	
72	SDN SEBANI 1 TARIK	
	SDN SEBANI 2 TARIK	
	SDN MLIRIPROWO TARIK	
73	SDN KRAMATTEMENGGUNG 1 TARIK	
	SDN KRAMATTEMENGGUNG 2 TARIK	
74	SDN PILANG 1 WONOAYU	
	SDN PILANG 2 WONOAYU	
	SDN KETIMANG WONOAYU	
	SDN SUBEREJO 1 WONOAYU	
	SDN SUMBEREJO 2 WONOAYU	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
75	SDN JIMBARAN KULON WONOAYU	
	SDN JIMBARAN WETAN WONOAYU	
	SDN PLOSO WONOAYU	
	SDN WONOAYU 2	
	SDN GRABAGAN	Dari Kec. Tulangan
76	SDN WONOAYU 1	
	SDN POPOH WONOAYU	
	SDN SEMAMBUNG WONOAYU	
	SDN SIMOKETAWANG WONOAYU	
	SDN SIMOANGIN-ANGIN WONOAYU	
	SDN TANGGUL WONOAYU	
77	SDN PAGERNGUMBUK 1 WONOAYU	
	SDN PAGERNGUMBUK 2 WONOAYU	
	SDN WONOKALANG WONOAYU	
	SDN MULYODADI WONOAYU	
	SDN CANDINEGORO WONOAYU	
78	SDN BECIRONGENGOR WONOAYU	
	SDN KARANGPURI 1 WONOAYU	
	SDN KARANGPURI 2 WONOAYU	
	SDN PLAOSAN 1 WONOAYU	
	SDN PLAOSAN 2 WONOAYU	
	SDN LAMBANGAN WONOAYU	
79	SDN WONOKASIAN 1 WONOAYU	
	SDN WONOKASIAN 2 WONOAYU	
	SDN SAWOCANGKRING WONOAYU	
	SDN MOJORANGSUNG WONOAYU	
80	SDN WATUTULIS 1 PRAMBON	
	SDN WATUTULIS 2 PRAMBON	
	SDN TEMU 1 PRAMBON	
	SDN TEMU 2 PRAMBON	
	SDN WONOPLINTAHAN 2 PRAMBON	
	SDN BENDOTRETEK PRAMBON	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
81	SDN SIMOGIRANG 1 PRAMBON	
	SDN SIMOGIRANG 2 PRAMBON	
	SDN JEDONGCANGKRING PRAMBON	
	SDN CANGKRINGTURI PRAMBON	
	SDN WONOPLINTAHAN 1 PRAMBON	
82	SDN KEDUNGWONOKERTO PRAMBON	
	SDN KAJARTENGGULI PRAMBON	
	SDN PRAMBON 1	
	SDN PRAMBON 2	
83	SDN KEDUNGSUGO 1 PRAMBON	
	SDN KEDUNGSUGO 2 PRAMBON	
	SDN KEDUNGKEMBAR PRAMBON	
84	SDN GAMPANG PRAMBON	
	SDN JATI ALUN-ALUN PRAMBON	
	SDN JATIKALANG PRAMBON	
	SDN BULANG PRAMBON	
	SDN SIMPANG PRAMBON	
85	SDN GEDANGROWO PRAMBON	
	SDN WIROBITING 1 PRAMBON	
	SDN WIROBITING 2 PRAMBON	
	SDN PEJANGKUNGAN PRAMBON	
86	SDN PERTAPANMADURETNO TAMAN	
	SDN TANJUNGSARI 1 TAMAN	
	SDN TANJUNGSARI 2 TAMAN	
	SDN TROSOBO 1 TAMAN	



ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
87	SDN KREMBANGAN TAMAN	
	SDN TAWANGSARI 1 TAMAN	
	SDN TAWANGSARI 3 TAMAN	
	SDN GILANG 2 TAMAN	
	SDN NGELOM TAMAN	
	SDN KLETEK TAMAN	
	SDN GILANG 1 TAMAN	
88	SDN GELURAN 1 TAMAN	
	SDN GELURAN 2 TAMAN	
	SDN KALIJATEN TAMAN	
	SDN WONOCOLO 1	
	SDN WONOCOLO 2	
	SDN WONOCOLO 4	
89	SDN BEBEKAN TAMAN	
	SDN SEPANJANG 1 TAMAN	
	SDN SEPANJANG 2 TAMAN	
	SDN KETEGAN 1 TAMAN	
	SDN KETEGAN 3 TAMAN	
90	SDN TROSOBO 2 TAMAN	
	SDN KRAMATJEGU 1 TAMAN	
	SDN KRAMATJEGU 2 TAMAN	
91	SDN SIDODADI 1 TAMAN	
	SDN SIDODADI 2 TAMAN	
	SDN BRINGINBENDO 1 TAMAN	
	SDN BRINGINBENDO 2 TAMAN	
92	SDN SAMBIBULU TAMAN	
	SDN SADANG TAMAN	
	SDN JEMUNDO 1 TAMAN	
	SDN JEMUNDO 2 TAMAN	
93	SDN GELURAN 3 TAMAN	
	SDN WAGE 1 TAMAN	
	SDN WAGE 2 TAMAN	
	SDN BOHAR TAMAN	
	SDN KEDUNGTURI TAMAN	
	SDN TAMAN	
	SDN SUKO	Dari Kec. Sukodono

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
94	SDN JOGOSATRU SUKODONO	
	SDN CANGKRINGSARI SUKODONO	
	SDN NGARESREJO SUKODONO	
	SDN SAMBUNGREJO SUKODONO	
95	SDN PANJUNAN SUKODONO	
	SDN SUKODONO 2	
	SDN BANGSRI SUKODONO	
	SDN MASANGANKULON SUKODONO	
96	SDN SUKODONO 1	
	SDN PLUMBUNGAN SUKODONO	
	SDN KLOPOSEPULUH 1 SUKODONO	
	SDN PEKARUNGAN SUKODONO	
	SDN PADEMONEGORO SUKODONO	
97	SDN KLAGEN SUKODONO	
	SDN KEBONAGUNG 1 SUKODONO	
	SDN KEBONAGUNG 2 SUKODONO	
	SDN ANGGASWANGI 1 SUKODONO	
	SDN ANGGASWANGI 2 SUKODONO	
	SDN URANGAGUNG	Dari Kec. Sidoarjo
	SDN SARIROGO	Dari Kec. Sidoarjo
98	SDN JUMPUTREJO SUKODONO	
	SDN KLOPOSEPULUH 2 SUKODONO	
	SDN SURUH SUKODONO	
	SDN MASANGAN WETAN SUKODONO	
99	SDN SAWOTRATAP 1 GEDANGAN	
	SDN SAWOTRATAP 2 GEDANGAN	
	SDN SEMAMBUNG 1 GEDANGAN	
	SDN SEMAMBUNG 2 GEDANGAN	
	SDN BANGAH GEDANGAN	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
100	SDN KEBOAN ANOM GEDANGAN	
	SDN KEBOAN SIKEP 1 GEDANGAN	
	SDN KEBOAN SIKEP 2 GEDANGAN	
	SDN GANTING GEDANGAN	
101	SDN TEBEL GEDANGAN	
	SDN SRUNI 1 GEDANGAN	
	SDN SRUNI 2 GEDANGAN	
	SDN KARANGBONG GEDANGAN	
102	SDN GEDANGAN	
	SDN KETAJEN 1 GEDANGAN	
	SDN KETAJEN 2 GEDANGAN	
	SDN WEDI GEDANGAN	
103	SDN KRAGAN GEDANGAN	
	SDN GEMURUNG GEDANGAN	
104	SDN PUNGGUL 1 GEDANGAN	
	SDN PUNGGUL 2 GEDANGAN	
105	SDN BUNGURASIH I WARU	
	SDN MEDAENG I WARU	
	SDN MEDAENG II WARU	
	SDN PEPELEGI I WARU	
	SDN PEPELEGI II WARU	
	SDN WARU I	
106	SDN KEDUNG REJO WARU	
	SDN WARU 2	
	SDN KUREKSARI WARU	
	SDN JANTI I WARU	
	SDN JANTI II WARU	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
107	SDN KEPUH KIRIMAN I WARU	
	SDN WEDORO WARU	
	SDN NGINGAS WARU	
	SDN TROPODO I WARU	
	SDN TROPODO II WARU	
	SDN KEPUH KIRIMAN II WARU	
108	SDN BEREBEK WARU	
	SDN WADUNGASRI WARU	
	SDN TAMBAK SUMUR WARU	
	SDN TAMBAK REJO WARU	
	SDN TAMBAK SUMUR WARU	
	SDN TAMBAK OSO WARU	
109	SDN SEMAMPIR SEDATI	
	SDN PRANTI SEDATI	
	SDN PABEAN 1 SEDATI	
	SDN PABEAN 2 SEDATI	
110	SDN SEDATI GEDE 1	
	SDN SEDATI GEDE 2	
	SDN BETRO SEDATI	
	SDN SEDATI AGUNG	
111	SDN KWANGSAN SEDATI	
	SDN PEPE SEDATI	
	SDN PULUNGAN SEDATI	
	SDN BUNCITAN SEDATI	
	SDN CEMANDI SEDATI	

ZONA	SATUAN PENDIDIKAN	KET
112	SDN KALANGANYAR SEDATI	
	SDN BANJARKEMUNING SEDATI	
	SDN GISIK CEMANDI SEDATI	
	SDN SEGORO TAMBAK SEDATI	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 26 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA  
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI , SEKOLAH  
DASAR NEGERI DAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SIDOARJO

**Zona PPDB Jenjang SMP Negeri**

<b>ZONA</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	SMPN 1 SIDOARO
	SMPN 2 SIDOARJO
	SMPN 4 SIDOARJO
<b>2</b>	SMPN 3 SIDOARJO
	SMPN 5 SIDOARJO
	SMPN 6 SIDOARJO
<b>3</b>	SMPN 1 CANDI
	SMPN 3 CANDI
<b>4</b>	SMPN 2 CANDI
	SMPN 2 TANGGULANGIN
<b>5</b>	SMPN 1 JABON
	SMPN 2 JABON
<b>6</b>	SMPN 1 TANGGULANGIN
	SMPN 2 PORONG
<b>7</b>	SMPN 1 PORONG
	SMPN 3 PORONG
<b>8</b>	SMPN 1 TULANGAN
	SMPN 1 PRAMBON
<b>9</b>	SMPN 1 KREMBUNG
	SMPN 2 KREMBUNG
<b>10</b>	SMPN 1 TARIK
	SMPN 2 TARIK

<b>ZONA</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>
<b>11</b>	SMPN 1 BALONGBENDO
	SMPN 2 BALONGBENDO
<b>12</b>	SMPN 1 KRIAN
	SMPN 2 KRIAN
	SMPN 3 KRIAN
<b>13</b>	SMPN 1 WONOAYU
	SMPN 2 WONOAYU
<b>14</b>	SMPN 1 SUKODONO
	SMPN 2 BUDURAN
	SMPN 2 GEDANGAN
<b>15</b>	SMPN 1 BUDURAN
	SMPN 1 GEDANGAN
<b>16</b>	SMPN 1 WARU
	SMPN 2 WARU
<b>17</b>	SMPN 2 TAMAN
	SMPN 3 TAMAN
	SMPN 2 SUKODONO
<b>18</b>	SMPN 3 WARU
	SMPN 1 TAMAN
<b>19</b>	SMPN 4 WARU
	SMPN 1 SEDATI
	SMPN 2 SEDATI

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH